

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

REKLASIFIKASI GOLONGAN TARIF PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkesinambungan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan golongan pelanggan agar lebih proporsional, mempertahankan kuantitas produksi, dan menjaga kontinuitas pengaliran, serta mempertahankan kinerja keuangan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Reklasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Bogor Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5);
 17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
 18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
REKLASIFIKASI GOLONGAN TARIF PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
9. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.

BAB II

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN PDAM

Pasal 2

- (1) Klasifikasi kelompok pelanggan PDAM meliputi:
 - a. Sosial;
 - b. Rumah tangga;
 - c. Instansi Pemerintah;
 - d. Niaga;
 - e. Industri;
 - f. Kelompok Khusus.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

No	Kelompok Pelanggan	Keterangan
1	2	3

I	Sosial Umum (S1)	Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. terminal air; 2. hidran umum/kran kelompok; 3. tempat ibadah (masjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng, dan sejenisnya); 4. Posyandu.
	Sosial Khusus (S2)	<p>Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat, serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. panti asuhan; 2. yayasan sosial; 3. sekolah negeri; 4. rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat; 5. asrama pelajar/mahasiswa perguruan tinggi negeri; 6. pesantren, madrasah, dan TPA; 7. MCK sosial; 8. kantor organisasi massa/partai politik.
II	Rumah Tangga	Rumah yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

	Rumah Tangga 1 (R1)	Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier.
	Rumah Tangga 2 (R2)	1. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di jalan sekunder 1;
		2. Luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier; 3. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan tertier dan jalan sekunder 3; 4. R1 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 3 (R3)	1. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan sekunder 3 dan jalan sekunder 2; 2. Luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan sekunder 3 dan jalan sekunder 2; 3. Luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier; 4. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan sekunder 2;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Luas bangunan > 36 m² s.d. ≤ 54 m² yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan tertier dan jalan sekunder; 6. R2 yang mempunyai kegiatan usaha.
--	--	--

1	2	3
	Rumah Tangga 4 (R4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan utama; 2. Luas bangunan > 36 m² s.d. ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan sekunder 1; 3. Luas bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan sekunder 3 dan jalan sekunder 2; 4. Luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier; 5. Luas bangunan > 36 m² s.d. ≤ 54 m² yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan sekunder 2;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Luas bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan tertier dan jalan sekunder 3; 7. R3 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 5 (R5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan > 36 m² s.d. ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan utama; 2. Luas bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan sekunder 1;
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan sekunder 3 dan jalan sekunder 2; 4. Luas bangunan > 100 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan lingkungan; 5. Luas bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan sekunder 2; 6. Luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan tertier dan jalan sekunder 3;

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Luas bangunan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan mewah, terletak di jalan sekunder 3; 8. R4 yang mempunyai kegiatan usaha.
Rumah Tangga 6 (R6)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan utama; 2. Luas bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di daerah permukiman, terletak di jalan sekunder 1; 3. Luas bangunan $> 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan tertier dan jalan sekunder 3; 4. Luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan sekunder 1;
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Luas bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan sekunder 2; 6. Luas bangunan $> 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum terletak di jalan tertier dan jalan sekunder 3; 7. Luas bangunan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan mewah, terletak di jalan sekunder 2;

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Luas bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² yang berlokasi di perumahan mewah, terletak di jalan sekunder 3; 9. R5 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 7 (R7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² yang berlokasi di permukiman, terletak di jalan utama; 2. Luas bangunan > 100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di jalan sekunder 2, jalan sekunder 1; 3. Luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di jalan sekunder 1; 4. Luas bangunan > 100 yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan sekunder 2; 5. Luas bangunan ≤ 54 m² yang berlokasi di perumahan mewah, terletak di jalan sekunder 1; 6. Luas bangunan > 54 m² s.d. ≤ 70 m² yang berlokasi di perumahan mewah, terletak di jalan sekunder 2;
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 150 m² yang berlokasi di perumahan mewah, terletak di jalan sekunder 3; 8. R6 yang mempunyai kegiatan usaha.

	<p>Rumah Tangga 8 (R8)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan > 100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di jalan utama; 2. Luas bangunan > 100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di jalan sekunder 1; 3. Luas bangunan > 54 m² ≤ 70 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di jalan sekunder 1; 4. Luas bangunan > 70 m² ≤ 150 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di jalan sekunder 2, jalan sekunder 1; 5. Luas bangunan > 150 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di jalan sekunder 3, jalan sekunder 2, sekunder 1; 6. R7 yang mempunyai kegiatan usaha.
<p>III</p>	<p>Instansi Pemerintah</p>	<p>Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan instansi pemerintah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TNI; 2. POLRI; 3. lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah; 4. asrama pemerintah/TNI/Polri; 5. dan sejenisnya.

IV	Niaga	Kegiatan usaha yang berada di wilayah perniagaan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
	Niaga 1 (N1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. warung; 2. toko kecil (makanan dan minuman, alat rumah tangga, dan sejenisnya); 3. bengkel kecil; 4. kios-kios; 5. rumah makan kecil; 6. katering kecil; 7. kerajinan tangan dan rumah tangga; 8. warung internet kecil; 9. kamar mandi/WC umum komersial; 10. hidran umum komersial; 11. pencucian mobil/motor; 12. <i>pool</i> kendaraan; 13. penjahit kecil; 14. rumah kost kecil; 15. sanggar seni; 16. gedung sewa kecil 17. salon kecil; 18. praktek bidan kecil; 19. pusat kebugaran kecil; 20. sekolah swasta/ perguruan tinggi swasta; 21. koperasi; 22. gudang; 23. poliklinik/klinik 24 jam; 24. dan usaha yang sejenis.
	Niaga 2 (N2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. toko kelontong; 2. rumah makan/restoran menengah; 3. mini market; 4. toko bangunan menengah;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. <i>showroom/dealer</i> motor kecil; 6. <i>showroom/dealer</i> motor besar; 7. katering menengah; 8. perdagangan umum; 9. <i>factory outlet</i> kecil; 10. kafe musik dan restoran; 11. percetakan kecil; 12. penjahit menengah; 13. radio siaran non pemerintah; 14. gedung sewa besar; 15. gedung resepsi kecil; 16. wisma/losmen; 17. ruko; 18. tempat kursus; 19. agen/biro jasa, antara lain asuransi, akuntan, biro reklame/iklan; 20. kantor notaris/pengacara, konsultan; 21. salon menengah; 22. praktek dokter; 23. salon kecantikan dan SPA menengah; 24. rumah sakit bersalin swasta menengah; 25. apotik menengah; 26. dan usaha yang sejenis.
	<p>Niaga 3 (N3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. rumah makan/restoran besar; 2. super market/toko swalayan; 3. toko bangunan besar; 4. <i>showroom/dealer</i> motor menengah dan besar; 5. <i>showroom/dealer</i> mobil menengah dan besar (resmi); 6. katering besar; 7. <i>factory outlet</i> menengah dan besar; 8. kafe musik dan restoran;

		<ol style="list-style-type: none"> 9. percetakan menengah dan besar; 10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 11. bengkel besar; 12. eksportir/importir; 13. jasa ekspedisi; 14. kolam renang umum swasta menengah; 15. <i>waterboom</i> menengah; 16. hotel bintang 1-2; 17. bank cabang pembantu; 18. bioskop; 19. tempat hiburan; 20. gedung resepsi menengah; 21. agen/biro jasa menengah; 22. kantor milik swasta menengah 23. perusahaan berbentuk CV, firma, dan koperasi besar; 24. salon besar; 25. salon kecantikan dan Spa besar; 26. rumah sakit bersalin swasta menengah; 27. rumah sakit tipe B; 28. dan usaha yang sejenis.
	<p>Niaga 4 (N4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. hypermarket (mal); 2. pertambangan; 3. bank kantor cabang; 4. hotel berbintang 3-5; 5. <i>coldstorage</i>; 6. kolam renang umum swasta besar; 7. <i>waterboom</i> besar; 8. gedung resepsi besar; 9. rumah sakit tipe A; 10. dan usaha yang sejenis.

V	Industri	Kegiatan industri yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
	Industri 1 (I 1)	1. pabrik es; 2. industri rumah tangga; 3. usaha industri kecil; 4. dan usaha yang sejenis.
	Industri 1 (I 2)	1. pabrik tekstil; 2. garmen; 3. pabrik ban; 4. karoseri; 5. pabrik perkayuan/ <i>furniture</i> ; 6. peternakan besar; 7. pabrik makanan dan minuman; 8. pabrik obat; 9. dan usaha yang sejenis.
VI	KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas, dan
 - f. perlindungan air baku.

- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.

- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB IV BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Besaran tarif air minum ditetapkan sebagai berikut:

No	Golongan Tarif	Besaran Tarif Air Minum (Rp)	
		0-10 m ³	> 10 m ³
1	Sosial Umum (S1)	600	900
2	Sosial Khusus (S2)	1.000	1.700
3	Rumah Tangga 1 (R1)	1.100	1.800
4	Rumah Tangga 2 (R2)	1.200	2.100
5	Rumah Tangga 3 (R3)	1.400	2.400
6	Rumah Tangga 4 (R4)	1.800	3.000
7	Rumah Tangga 5 (R5)	2.200	3.700
8	Rumah Tangga 6 (R6)	3.300	5.500
9	Rumah Tangga 7 (R7)	4.200	6.400
10	Rumah Tangga 8 (R8)	5.000	7.200
11	Instansi Pemerintah (IP)	4.800	6.400
12	Niaga 1 (N1)	5.000	8.500
13	Niaga 2 (N2)	6.000	9.000
14	Niaga 3 (N3)	7.300	12.400
15	Niaga 4 (N4)	8.300	13.900
16	Industri 1 (I1)	9.000	14.200
17	Industri 2 (I2)	10.000	15.200
18	Kelompok Khusus	Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.	

- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nomor 18 diberlakukan untuk pelanggan-pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan PDAM.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Klasifikasi kelompok golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku untuk rekening bulan Juli 2010 yang ditagihkan pada bulan Agustus 2010.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 7 Mei 2010

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN